



Judul : Tunjangan Rumah Dinas Bisa Membebani
Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Tunjangan Rumah Dinas Bisa Membebani

Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, Minggu (22/8/2021), menolak wacana penggantian fasilitas rumah dinas bagi anggota dewan menjadi tunjangan. Ia mengatakan, anggaran untuk sewa rumah diperkirakan lebih tinggi jika tidak boleh jauh dari Gedung DPR di Senayan, Jakarta. Akibatnya, bisa membebani keuangan negara. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, rencana penggantian fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan akan melalui kajian terlebih dahulu. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menuturkan, BURT DPR yang mengusulkan mengganti fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan, tetapi usulan itu masih diteliti Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu karena menyangkut anggaran. (SYA)